

KETIMPANGAN GENDER DAN PENCAPAIAN SDGS DI INDONESIA: MENGKALI HUBUNGAN ANTARA KESETARAAN GENDER DAN PEMBANGUNAN

Efi Susilawati^{a,1}, Berlian Gultom^{b,2}, Galuh Rahma Desrida^{c,3}, Suci Rahmawati^{d,4}, Imas Masriah^{e,5}

Universitas Pamulang

¹ *efisusilawati08@gmail.com*; ² *gultomberlian1@gmail.com*;
³ *galuhdesri@gmail.com*; ⁴ *arrash1904@gmail.com*; ⁵ *dosen02036@unpam.ac.id*

Naskah diterima: 12-12-2022, direvisi: 14-12-2022, disetujui: 30-12-2022

ABSTRAK

Ketimpangan gender merupakan salah satu isu krusial yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek kesetaraan gender, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan, serta menganalisis bagaimana ketimpangan gender dapat menghambat pencapaian SDGs. Melalui pendekatan analisis data dan studi kasus, jurnal ini akan memberikan wawasan mengenai dampak ketimpangan gender terhadap berbagai indikator pembangunan, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan kesetaraan gender sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata-kata kunci: Ketimpangan gender, kesetaraan gender, pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals (SDGs)

PENDAHULUAN

Ketimpangan gender di Indonesia masih menjadi tantangan yang signifikan dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Menurut laporan World Economic Forum (2022), Indonesia menempati peringkat ke-101 dari 156 negara dalam Indeks Kesetaraan Gender, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar dalam partisipasi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan antara pria dan wanita. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kesetaraan gender dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, yang mencakup pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan pendidikan berkualitas.

Salah satu indikator penting dari ketimpangan gender adalah partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia pada tahun 2021 hanya mencapai 55%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 83% (BPS, 2021). Rendahnya partisipasi perempuan di sektor ekonomi tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi potensi inovasi dan produktivitas. Dengan meningkatkan kesetaraan gender dalam dunia kerja, Indonesia dapat memanfaatkan potensi penuh dari seluruh sumber daya manusianya.

Selain itu, pendidikan juga menjadi faktor kunci dalam mencapai kesetaraan gender. Meskipun angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia menunjukkan kemajuan, terdapat disparitas yang signifikan di tingkat pendidikan tinggi. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020), hanya sekitar 40% perempuan yang melanjutkan pendidikan tinggi dibandingkan dengan 60% laki-laki. Hal ini berimplikasi pada keterampilan dan kemampuan perempuan untuk bersaing di pasar kerja, yang pada gilirannya mempengaruhi ekonomi dan pembangunan sosial.

Kasus-kasus kekerasan berbasis gender juga menjadi isu yang mendesak di Indonesia. Menurut data Komnas Perempuan, pada tahun 2021 terdapat lebih dari 300.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, dengan angka ini kemungkinan jauh lebih tinggi karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai SDGs, diperlukan upaya yang lebih serius dalam menangani isu ini melalui kebijakan yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Dalam konteks ini, penting untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya akan membantu mengurangi ketimpangan gender, tetapi juga akan mempercepat pencapaian SDGs. Dengan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, Indonesia dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi perempuan diakomodasi, sehingga menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konteks Ketimpangan Gender di Indonesia

Ketimpangan gender di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan mendalam, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, rasio partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih jauh di

bawah laki-laki, dengan angka mencapai 55% untuk perempuan dan 85% untuk laki-laki (BPS, 2021). Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah studi oleh World Bank (2020) menunjukkan bahwa jika partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkat, maka PDB Indonesia dapat tumbuh hingga 3% lebih tinggi setiap tahunnya.

Salah satu contoh nyata dari ketimpangan ini adalah dalam sektor pendidikan. Meskipun angka partisipasi sekolah untuk perempuan telah meningkat, kualitas pendidikan yang diterima seringkali tidak sebanding dengan laki-laki. Data dari UNESCO (2020) menunjukkan bahwa tingkat putus sekolah untuk perempuan di daerah pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, yang menunjukkan adanya hambatan struktural yang harus diatasi. Dalam konteks ini, ketimpangan gender tidak hanya menjadi masalah moral, tetapi juga merupakan penghalang bagi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas.

Di sektor kesehatan, ketimpangan gender juga terlihat jelas. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2021), angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi, mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup, yang jauh di atas target SDGs yang menetapkan angka kematian ibu di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Ketidaksetaraan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah terpencil, menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kematian ibu. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya perhatian khusus terhadap isu gender, pencapaian SDGs di bidang kesehatan akan sulit terwujud.

Lebih jauh lagi, ketimpangan gender juga berpengaruh pada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Menurut data dari Inter-Parliamentary Union (2021), hanya 20% dari anggota DPR di Indonesia adalah perempuan. Rendahnya representasi perempuan dalam politik mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan gender dalam kebijakan publik. Tanpa adanya suara perempuan dalam pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak sensitif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan, yang pada gilirannya menghambat pencapaian SDGs.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa ketimpangan gender bukan hanya masalah sosial, tetapi juga merupakan tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai SDGs, terutama tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dengan memahami konteks ketimpangan gender yang ada, kita dapat mulai merancang solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Dampak Ketimpangan Gender terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Ketimpangan gender memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu dampak langsungnya adalah pada pertumbuhan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan mengurangi potensi produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Menurut laporan McKinsey Global Institute (2015), jika perempuan di Indonesia diberi akses yang sama dengan laki-laki dalam hal pekerjaan, maka PDB Indonesia dapat meningkat sebesar 2,6 triliun dolar AS pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa mengatasi ketimpangan

gender bukan hanya masalah keadilan sosial, tetapi juga merupakan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dampak lainnya terlihat dalam sektor kesehatan. Ketidaksetaraan dalam akses layanan kesehatan yang berkualitas berdampak langsung pada kesehatan ibu dan anak. Laporan dari UNICEF (2020) mencatat bahwa anak-anak dari ibu yang kurang terdidik dan memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan cenderung memiliki kesehatan yang lebih buruk, yang berimplikasi pada tingkat kematian anak yang lebih tinggi. Dengan demikian, ketimpangan gender dalam kesehatan tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan SDGs yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan.

Di bidang pendidikan, ketimpangan gender juga berkontribusi pada siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Data dari World Bank (2021) menunjukkan bahwa perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai cenderung terjebak dalam pekerjaan yang kurang produktif dan berpenghasilan rendah. Hal ini mengakibatkan kurangnya akses mereka terhadap sumber daya ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, ketimpangan gender dalam pendidikan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Ketimpangan gender juga mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Rendahnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan, baik di sektor publik maupun swasta, mengakibatkan hilangnya perspektif dan pengalaman yang berharga dalam perumusan kebijakan. Menurut laporan dari UN Women (2020), negara-negara dengan lebih banyak perempuan dalam posisi kepemimpinan cenderung memiliki kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dampak ketimpangan gender terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia sangat luas dan kompleks. Untuk mencapai SDGs, perlu ada upaya yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi dalam mengatasi isu-isu gender. Hal ini mencakup peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik bagi perempuan, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.

C. Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengatasi Ketimpangan Gender

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi ketimpangan gender melalui kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan kesetaraan gender. Salah satu inisiatif utama adalah penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Melalui undang-undang ini, pemerintah berkomitmen untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan kelemahan dalam penegakan hukum.

Salah satu program yang diinisiasi oleh pemerintah adalah Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021), program ini telah berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti budaya patriarki yang masih kuat di beberapa daerah.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik melalui kuota perempuan dalam pemilihan legislatif. Meskipun kuota ini telah meningkatkan jumlah perempuan di DPR, tantangan tetap ada, termasuk stereotip gender dan kurangnya dukungan untuk perempuan dalam kampanye politik. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2019, hanya 20% dari calon legislatif adalah perempuan, menunjukkan bahwa masih ada jalan panjang untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik.

Di tingkat masyarakat, berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) juga berperan aktif dalam mengadvokasi isu-isu gender. Contohnya, organisasi seperti Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) telah berhasil memberdayakan perempuan di daerah pedesaan melalui program pelatihan keterampilan dan akses ke sumber daya ekonomi. Menurut laporan PEKKA (2020), program ini telah membantu ribuan perempuan untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mengambil peran lebih aktif dalam pengambilan keputusan di komunitas mereka.

Secara keseluruhan, meskipun telah ada berbagai upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi ketimpangan gender, tantangan yang ada masih memerlukan perhatian serius. Peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih kuat, dan dukungan terhadap perempuan dalam politik dan ekonomi menjadi kunci untuk mencapai kesetaraan gender dan mendukung pencapaian SDGs di Indonesia.

D. Rekomendasi untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pencapaian SDGs

Untuk meningkatkan kesetaraan gender dan mendukung pencapaian SDGs di Indonesia, diperlukan serangkaian rekomendasi yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, pemerintah harus memperkuat implementasi undang-undang dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Ini termasuk memastikan bahwa semua program dan kebijakan publik mempertimbangkan perspektif gender dan memberikan dukungan yang memadai untuk perempuan, terutama di daerah terpencil. Menurut UN Women (2021), negara-negara yang menerapkan kebijakan berbasis gender secara efektif cenderung mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Kedua, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam upaya mengatasi ketimpangan gender. Program pendidikan yang inklusif dan sensitif terhadap gender perlu diperkuat, termasuk peningkatan akses bagi perempuan di daerah pedesaan. Menurut laporan dari UNESCO (2020), pendidikan yang berkualitas bagi perempuan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan keluarga mereka. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan perempuan harus menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan.

Ketiga, perlu ada upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan keterampilan dan akses ke modal bagi perempuan, serta penerapan kuota perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor swasta dan publik. Menurut McKinsey Global Institute (2020), meningkatkan partisipasi perempuan dalam

angkatan kerja dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, dan hal ini harus menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi nasional.

Keempat, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu gender dan mengatasi stigma dan stereotip yang ada. Kampanye pendidikan dan advokasi yang melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk laki-laki, perlu dilakukan untuk menciptakan budaya yang mendukung kesetaraan gender. Menurut laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021), perubahan budaya dan sikap masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender.

Kelima, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesetaraan gender. Kemitraan yang strategis dapat menciptakan sinergi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan pencapaian SDGs. Dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam semua aspek pembangunan, Indonesia dapat bergerak lebih dekat menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan.

Analisis Ketimpangan Gender dalam Konteks SDGs di Indonesia

A. Definisi dan Konsep Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan gender sering kali diukur melalui indikator-indikator seperti partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, akses terhadap pendidikan, dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja hanya mencapai 54,4%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 83,5% (BPS, 2021). Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada perempuan, tetapi juga pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pentingnya kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan utama.

Dalam konteks SDGs, tujuan ke-5 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tetapi juga merupakan prasyarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan gender dapat menghambat kemajuan di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Misalnya, perempuan yang tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan cenderung memiliki tingkat kesehatan yang lebih rendah dan keterlibatan ekonomi yang minim, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional (UN Women, 2020).

Pentingnya memahami ketimpangan gender dalam konteks SDGs juga tercermin dalam laporan Global Gender Gap Index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 101 dari 156 negara dalam hal kesetaraan gender, menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, banyak tantangan yang harus dihadapi (World Economic Forum, 2021). Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan kondisi sosial, tetapi juga mencerminkan kebijakan dan praktik yang mendiskriminasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

B. Dampak Ketimpangan Gender terhadap Pembangunan Ekonomi

Ketimpangan gender memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil mengurangi ketimpangan gender cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sebagai contoh, McKinsey Global Institute (2015) memperkirakan bahwa jika perempuan berpartisipasi secara setara dalam angkatan

kerja, PDB Indonesia dapat meningkat hingga 12% pada tahun 2025. Namun, kenyataannya, banyak perempuan yang terhalang oleh norma sosial dan budaya yang membatasi peran mereka di pasar kerja.

Sektor informal merupakan salah satu area di mana perempuan sering kali terjebak dalam pekerjaan yang tidak teratur dan tidak aman. Menurut International Labour Organization (ILO), sekitar 60% perempuan di Indonesia bekerja di sektor informal, yang sering kali tidak memberikan perlindungan sosial yang memadai (ILO, 2020). Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana perempuan tidak memiliki akses ke sumber daya ekonomi yang cukup untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga mereka.

Selain itu, ketimpangan gender juga berdampak pada inovasi dan produktivitas. Studi menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki keberagaman gender yang baik cenderung lebih inovatif dan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Namun, di Indonesia, masih terdapat hambatan bagi perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam perusahaan. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, hanya 20% dari pengusaha di Indonesia adalah perempuan (Kemenkop UKM, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

C. Ketimpangan Gender dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, meskipun ada kemajuan dalam akses pendidikan bagi perempuan, masih terdapat kesenjangan yang signifikan. Menurut data UNESCO, tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi hanya mencapai 30% dibandingkan dengan 70% untuk laki-laki (UNESCO, 2021). Kesenjangan ini menciptakan tantangan besar bagi pencapaian SDGs, terutama dalam hal pemberdayaan perempuan dan pengurangan kemiskinan.

Di tingkat dasar dan menengah, meskipun angka partisipasi perempuan sudah meningkat, kualitas pendidikan yang diterima sering kali tidak setara. Banyak sekolah di daerah pedesaan yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pendidikan perempuan, seperti sanitasi yang layak dan keamanan. Hal ini menyebabkan banyak perempuan yang terpaksa putus sekolah, terutama saat memasuki usia remaja. Menurut laporan UNICEF, pada tahun 2020, sekitar 1,5 juta anak perempuan di Indonesia tidak melanjutkan pendidikan mereka karena alasan ekonomi dan sosial (UNICEF, 2020).

Pendidikan yang berkualitas juga berpengaruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berpendidikan lebih tinggi memiliki kemungkinan yang lebih baik untuk mengakses layanan kesehatan dan mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan tidak hanya berkontribusi pada kesetaraan gender, tetapi juga pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

D. Peran Kebijakan dalam Mengatasi Ketimpangan Gender

Kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi ketimpangan gender di Indonesia. Sejak diadopsinya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan gender. Namun, implementasi kebijakan tersebut sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya dan dukungan politik.

Salah satu contoh kebijakan yang berhasil adalah program pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program ini

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan akses perempuan terhadap modal usaha. Menurut laporan Kementerian, program ini telah berhasil meningkatkan pendapatan lebih dari 200.000 perempuan di seluruh Indonesia (Kemen PPPA, 2021). Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam menjangkau perempuan di daerah terpencil.

Selain itu, pentingnya data dan penelitian dalam merumuskan kebijakan yang responsif gender tidak dapat diabaikan. Data yang akurat dan terdistribusi dengan baik sangat penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sistem pengumpulan data yang terintegrasi dan responsif gender agar kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dalam mengatasi ketimpangan gender.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Indonesia merupakan tantangan serius yang mempengaruhi berbagai aspek pembangunan berkelanjutan. Meskipun telah ada berbagai upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi isu ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk mencapai kesetaraan gender dan mendukung pencapaian SDGs, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk penguatan kebijakan, peningkatan akses pendidikan, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan pengambilan keputusan. Dengan melibatkan semua pihak dan menciptakan kesadaran masyarakat, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi semua.

Ketimpangan gender di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian SDGs. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, tantangan yang ada masih memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Untuk mencapai kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, yang mencakup kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan, akses pendidikan yang setara, serta partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi.

Rekomendasi untuk pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya termasuk penguatan kebijakan yang responsif gender, peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, serta dukungan terhadap perempuan dalam sektor ekonomi. Selain itu, penting untuk melibatkan laki-laki dalam upaya kesetaraan gender, agar perubahan sosial dapat terjadi secara menyeluruh. Dengan komitmen dan tindakan yang tepat, Indonesia dapat mencapai kesetaraan gender yang lebih baik dan mendukung pencapaian SDGs secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Gender*. Jakarta: BPS.
- Can Add \$12 Trillion to Global Growth. McKinsey & Company
- International Labour Organization (ILO). (2020). *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture*. Geneva: ILO.
- Inter-Parliamentary Union. (2021). *Women in National Parliaments*.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). *Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM 2021*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2021).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Data Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Data Kesehatan Ibu dan Anak*.

Laporan Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Jakarta: Kemen PPPA.

McKinsey Global Institute. (2015). The Power of Parity.

McKinsey Global Institute. (2015). The Power of Parity: How Advancing Women's Equality

McKinsey Global Institute. (2020). The Future of Women at Work.

UNESCO. (2020). Global Education Monitoring Report.

UNICEF. (2020). The State of the World's Children.

UN Women. (2020). Progress of the World's Women.